



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 513571
2019, KEBUTUHAN DASAR WARGA TERCUKUPI

Program KMS Hanya Bersifat Pendataan

Oleh Suryani (Fraksi PDIP)

YOGYA (KR) - Program perlindungan sosial yang selama ini disematkan untuk pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS), yakni jaminan pendidikan dan kesehatan, dipastikan akan melebur ke program pemerintah pusat. Dengan begitu, KMS dinilai hanya akan bersifat pendataan. Terutama guna memastikan warga kurang mampu yang belum terakomodir pemerintah pusat, dapat dijamin oleh daerah.

"Sesuai target, pada tahun 2019 semua warga sudah terjamin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak ada lagi Jamkesda. Warga miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) otomatis menjadi peserta Penerima Bantuan Iur (PBI). Hal ini akan berdampak pada program KMS," tandas anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Yogya, Suryani, Rabu (18/4).

Hanya, data dalam BDT masih kerap tidak sesuai di daerah. Hal ini lantaran data tersebut bersumber dari hasil sensus lima tahunan oleh BPS. Berbeda dengan pendataan warga miskin dan rentan miskin di Kota Yogya yang selalu diperbarui tiap tahun melalui KMS.

Suryani menambahkan, pihaknya di Komisi D sudah memiliki kesepakatan dengan instansi Pemkot untuk meng-

Suryani menjaring aspirasi warga melalui reses.

gulirkan PBI daerah mulai 2019. Seluruh warga Kota Yogya yang bersedia ditempatkan di kelas III dalam program BPJS Kesehatan, maka iurnya akan ditanggung oleh APBD. Sehingga, warga yang tidak masuk dalam kuota PBI JKN tidak perlu khawatir lagi. "Otomatis jaminan kesehatan bagi anggota KMS sudah teratasi. Bukan pemegang KMS pun asal mau di kelas III, akan dijamin melalui PBI daerah," imbuhnya.

Sementara untuk jaminan pendidikan, selama ini pembiayaan sudah diakomodir melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Apalagi kuota siswa KMS mulai tahun ajaran ini resmi dihapuskan lantaran penerimaan peserta didik baru akan menerapkan sistem zonasi. Lagi-lagi, program KMS

untuk bidang pendidikan juga sudah teratasi.

Namun demikian, kendati program perlindungan sosial melalui KMS kelak melebur ke program pemerintah pusat, namun Suryani berharap KMS tetap diadakan. Hanya, fungsinya bukan lagi sebagai penyaluran program melainkan lebih bersifat pendataan. Selain itu, warga juga tidak perlu berebut memperoleh KMS manakala akses kebutuhan dasarnya sudah bisa dipenuhi pemerintah.

"Tetap ada KMS, tapi sifatnya lebih ke pendataan. Kemudian juga harus ada jaminan bahwa kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan harus benar-benar terakses oleh warga yang membutuhkan," tegasnya.

(Dhi)-c

KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005